

**ANALISIS KEBIJAKAN AIR TANAH
PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013
DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2018**

Tesis:

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir



Oleh: Nazil Afifatun Nikmah (19.O1.0003)

PROGRAM MAGISTER LINGKUNGAN DAN PERKOTAAN

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : ANALISIS KEBIJAKAN AIR TANAH PADA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 DAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2018

Diajukan oleh : NAZIL AFIFATUN NIKMAH

NIM : 19.O1.0003

Tanggal disetujui : 03 Mei 2023

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. J. Wijanto Hadipuro S.E., M.T.

Pembimbing 2 : P. Danardono S.H., M.Hum.

Penguji 1 : Dr. Ir. Djoko Suwarno M.Si

Penguji 2 : Dr. Materius Kristiyanto, Pr PR.

Penguji 3 : Dr. Eko Nurmardiansyah SH., M.Hum

Penguji 4 : Dr. J. Wijanto Hadipuro S.E., M.T.

Penguji 5 : P. Danardono S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi : P. Danardono S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Ir. Djoko Suwarno M.Si

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=19.O1.0003

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nazil Afifatun Nikmah

NIM : 19.01.0003

Progdi/Konsentrasi : Program Magister Ilmu Lingkungan dan Perkotaan

Dengan ini menyatakan bahwa laporan tugas akhir dengan judul “Analisis Kebijakan Air Tanah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018” tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 4 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Nazil Afifatun Nikmah

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nazil Afifatun Nikmah

Program Studi : Program Magister Ilmu Lingkungan dan Perkotaan

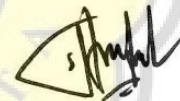
Jenis Karya : Tesis

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “Analisis Kebijakan Air Tanah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 4 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Nazil Afifatun Nikmah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sincerely for my self,

Thanks for giving the beautiful journey of life, for acceptance in all things, especially sincerity. Lots of momentum has been passed with many struggles, including to finish this study and there are many obstacles, so be stronger.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur selalu terucap kehadirat Allah SWT yang telah memberikan pengetahuan, kemantapan hati serta keluasan berfikir untuk mempelajari ilmu-Nya. Ribuan sholawat terucap kepada Nabi besar Muhammad S.A.W. sebagai pancaran ilmu Allah di dunia hingga penelitian tesis mengenai Politik dan Lingkungan Hidup yang berjudul, “Kebijakan Air Tanah dari Perspektif Etika Lingkungan Hidup” dapat terselesaikan dengan baik.

Tesis ini merupakan karya ilmiah yang disusun oleh penulis, dengan tujuan menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang politik dan lingkungan hidup. Kemampuan penulis dalam menuliskan laporan tesis ini sungguh jauh dari kata baik, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, alhamdulillah penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Keluarga besar di Kudus yang senantiasa mendoakan.
2. Bapak Dr. J. Wijanto Hadipuro, SE., MT selaku dosen pembimbing pertama.
3. Bapak Donny Danardono selaku dosen pembimbing kedua.
4. Para jajarannya dosen Program Magister Ilmu Lingkungan dan Perkotaan Unika Soegijapranata yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, dimana mereka telah sabar mengajarkan dan memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan terkhusus Gabriela yang selalu memberikan informasi akademik kepada penulis.
6. Sahabat seperjuangan di DPW PKB Jawa Tengah, terkhusus sahabat Umar Said Burhanuddin, Moh. Aji Pamungkas dan Pace yang senantiasa *support* agar studi ini terselesaikan.
7. Keluarga besar PMII Komisariat Brawijaya Malang, terkhusus Sahabati Faizatun Nikmah, Nikmah, Monika, dan Achmad Choirul Furqon yang tak pernah putus komunikasi dengan penulis.

DAFTAR ISI

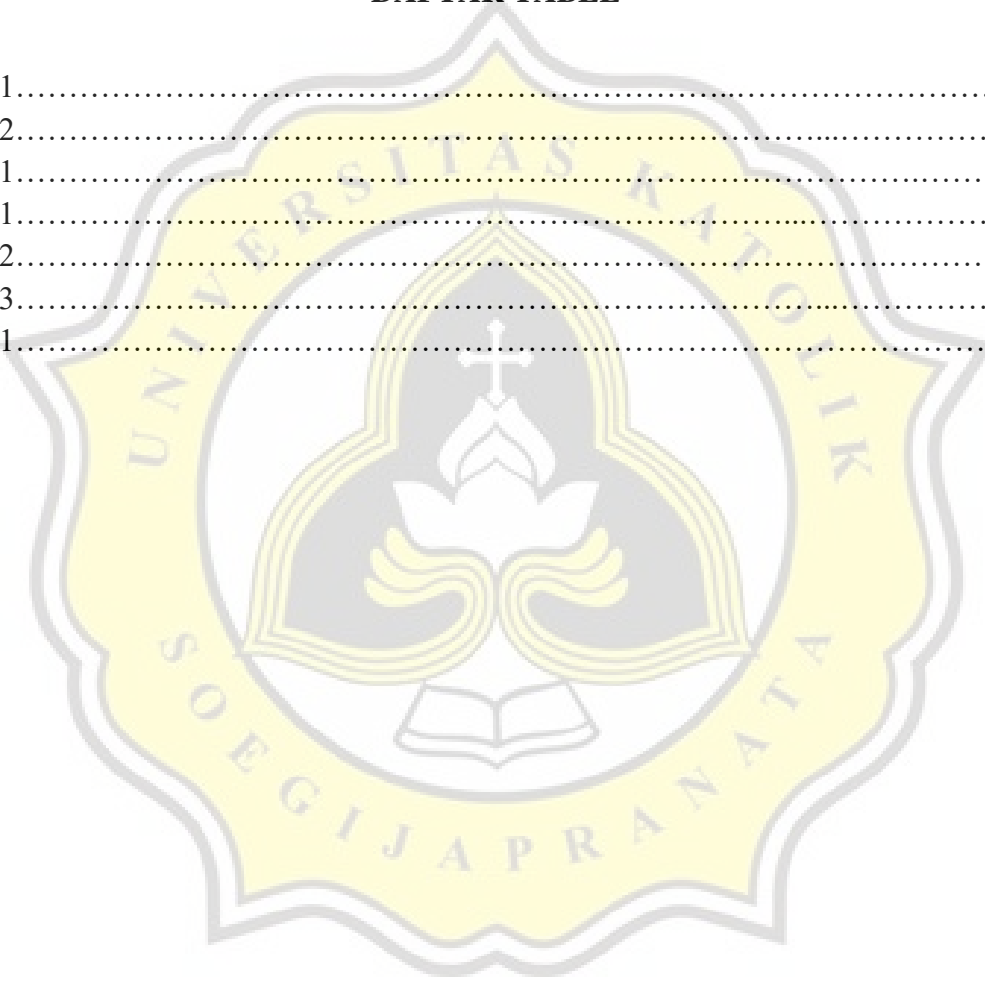
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK.....	x
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
1. Kajian Teori.....	8
2. Kerangka Konseptual	15
3. Penelitian Terdahulu	23
METODOLOGI PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Fokus Penelitian.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	33
F. Waktu Penelitian.....	35
HASIL PENELITIAN	38
A. Hasil Studi Baseline Data	38
PEMBAHASAN.....	52
A. Analisis Hirarki Konten Kebijakan Sumber Daya Air	52
B. Analisis Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018	53
C. Analisis Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018 Berdasarkan Pendekatan Etika Lingkungan Hidup.....	57
D. Implementasi Kebijakan Air Tanah Pada Kota Semarang	59
KESIMPULAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	20
Gambar 1.2.....	23
Gambar 2.1.....	36
Gambar 4.1.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	21
Tabel 1.2.....	24
Tabel 3.1.....	40
Tabel 4.1.....	52
Tabel 4.2.....	53
Tabel 4.3.....	57
Tabel 5.1.....	64



DAFTAR SINGKATAN



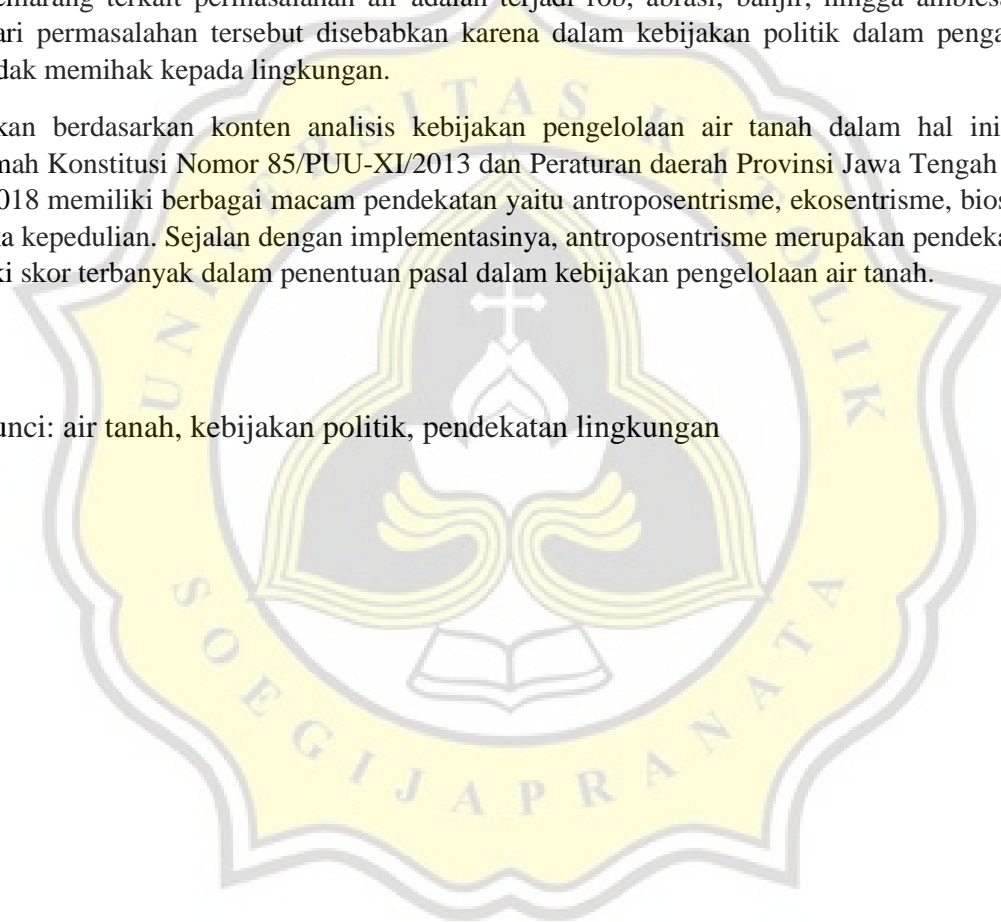
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMS	: Badan Usaha Milik Swasta
CAT	: Cekungan Air Tanah
CPR	: <i>Common Pool Resource</i>
DE	: <i>Deep Ecology</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
MK	: Mahkamah Konstitusi
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PERDA	: Peraturan Daerah
PP	: Peraturan Perundangan
PROV	: Provinsi
PRPP	: Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan
SDA	: Sumber Daya Air
SOJUPEK	: Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, Dan Karyawan
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
UU	: Undang-Undang

ABSTRAK

Air merupakan sumber kehidupan. Maka dari itu, perlunya kebijakan terkait pengaturan air yang di Indonesia. “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”, UUD 1945 Pasal 33. Dimana pada pasal tersebut menjadi pedoman atas kebijakan dibawahnya. Adapun dua kebijakan politik tentang pengaturan SDA (Sumber Daya Air) yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2018 tentang pengelolaan air tanah. Ditetapkannya dua kebijakan politik tersebut, serta merta memberikan manfaat terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun, hal itu tidak sejalan dengan implementasinya. Seperti di Kota Semarang terkait permasalahan air adalah terjadi rob, abrasi, banjir, hingga amblesan tanah. Akar dari permasalahan tersebut disebabkan karena dalam kebijakan politik dalam pengaturan air tanah tidak memihak kepada lingkungan.

Sedangkan berdasarkan konten analisis kebijakan pengelolaan air tanah dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2018 memiliki berbagai macam pendekatan yaitu antroposentrisme, ekosentrisme, biosentrisme dan etika kepedulian. Sejalan dengan implementasinya, antroposentrisme merupakan pendekatan yang memiliki skor terbanyak dalam penentuan pasal dalam kebijakan pengelolaan air tanah.

Kata kunci: air tanah, kebijakan politik, pendekatan lingkungan



ABSTRACT

Water is the source of life. So, water needing policy for regulating it in indonesia. "earth, water and riches on them authorized by state and used by as much as possible to welfare's people, constitution 1945 chapter 33. That on chapter be orientation for policy at below. There are two policies about managing water resources are regulations 85/PUU-XI/2013 about wwater resources and regulations in central java point 3 year 2018 about groundwater management. Legalizing that is policies, giving benefit to environment and people. However, it's not relate with the implementation. Like in Semarang city about water's problem are rob, abration, flood until land subsidence. Problem of root was caused by policies at ground water are not siding on environment.

However in conten analysis of public policy ground water are regulations 85/PUU-XI/2013 and regulations in central java point 3 year 2018 have many approaches between Anthroposentrism, Ecosentrism, Biocentrism, and ethic of care. With in implementation, Anthroposentrism is approach that top scor on policies ground water.

Keyword: graound water, political policies, Environmental approach

